JSP

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Pelindung
Rektor Universitas Gadjah Mada

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab
Sunyoto Usman

Dewan Redaksi
Moeljarto Tjokrowinoto
Ichlasul Amal
Sofian Effendi
Muhammad Amin Rais
Jahja Muhaimin
Afan Gaffar
Nasikun
Mohammad Mohtar Mas'oed
Bambang Setiawan
Ashadi Siregar
Susetiawan
Riswandha Imawan
Sugiono

Redaktur Pelaksana
Afan Gaffar (Ketua)
Ana Nadhya Abrar (Sekretaris)
Heru Nugroho
Siti Muti 'ah Setyawati
Cornelis Lay

Sekretariat
Muhammad Yahya
Soewarman

Alamat Redaksi dan Sekretariat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Justicia,
Bulak Sumur Yogyakarta 55281
Telp./Faks.: (0274) 563362

JSP

Volume I Nomor 2, Nopember 1997
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

DAFTAR ISI

Dari Redaksi iii

Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya
Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Heru Nugroho 1

Usaha Menghormati Keberadaan
Khalayak Televisi Swasta
Oleh: Ana Nadhya Abrar 13

Paradoks Demokrasi di Indonesia:
Kerusuhan pada Masa Kampanye Pemilu 1997
Lambang Trijono 27

Islam di Panggung Politik Indonesia:
Latar Belakang, Dinamika, dan Pergeserannya
Abdul Gaffar Karim 41

(Tidak) Demokrasi ala Asia
Eric Hiariej 57

Karakteristik dan Sumber Resiko
dalam Era Modernisasi Refleksi
Suharko 65

DARI REDAKSI

Sebuah jurnal ilmiah tidak cukup hanya dikelola dengan sungguh-sungguh oleh para redakturnya. Sebab, di luar itu, masih terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi rutinitas terbitnya. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain ketersediaan bahan tulisan dan biaya produksi yang naik tajam. Di sinilah kesungguhan penerbit sebuah jurnal ilmiah benar-benar diuji.

Keberhasilan mengatasi hambatan terbit sebuah jurnal ilmiah tentu mendatangkan kepuasan di hati para redakturnya. Namun kepuasan itu belum lengkap bila isinya tidak dibaca oleh banyak orang dan tidak dikutip pembacanya dalam diskusi maupun tulisan. Itulah sebabnya para redaktur jurnal ilmiah berusaha keras untuk meningkatkan *citation index* dari jurnal ilmiah yang mereka terbitkan.

Redaksi JSP juga mengalami kesulitan seperti yang disebutkan di atas. Untuk volume 1, nomor 2 ini, kesulitan itu bisa dilalui dengan selamat. meskipun terlambat, JSP bisa terbit dan mengunjungi pembacanya. Pembaca bisa menikmati enam tulisan yang semuanya berkaitan dengan demokrasi.

Dengan terbitnya JSP volume I, nomor 2 ini, berarti sudah dua kali JSP terbit. Karena itu, tentu terlalu dini bagi orang untuk menilai isi JSP. Tentu terlalu pagi untuk memposisikan JSP diantara jurnal-jurnal ilmiah tentang ilmu sosial dan ilmu politik yang terbit di Indonesia. Namun bagi para redakturnya, JSP diharapkan menjadi pelita yang bernyala cemerlang dan menghidupkan debat pubik tentang fenomena sosial dan politik kontemporer. JSP diharapkan abadi karena menjadi lambang dari kesungguhan menyajikan fenomena sosial dan politik mutakhir yang berpihak pada kepentingan orang banyak.

Selamat membaca

Afan Gaffar

Dekonstruksi Wacana SARA Negara
dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia*

Oleh: Heru Nugroho**

Ketika Derrida (1978) mengumumkan sebuah metode interpretasi atas teks, wacana, dan peristiwa yang kemudian disebut dengan dekonstruksi, maka pada saat itu semakin nampak bahwa ada kaitan antara kepentingan (*interest*) dan metode interpretasi. Cara individu, kelompok maupun rezim dalam menginterpretasikan fenomena sosial tidak dapat lepas dari dorongan atas kepentingan tertentu. Oleh karena itu sebuah pepatah konservatif yang mengatakan, "metode interpretasi bersifat netral, dan yang tidak netral adalah penggunaannya", tidak dapat lagi dibenarkan dari sudut epistemologi. Dalam prakteknya, setiap kepentingan — dalam hal ini kepentingan politis -- akan mendorong penggunaan metode interpretasi tertentu, tentu saja metode yang mendukung kepentingan tersebut. Dalam konteks ini, Derrida menegaskan bahwa interpretasi bersifat sewenang-wenang sehingga setiap orang, kelompok dan rezim berhak melakukan interpretasi atas teks. Pada sisi lain, Habermas (1972) dengan jitu merumuskan sebuah hipotesis, "terdapat kaitan strategis antara pengetahuan manusia (baik empiris-analitis, historis-hermeneutik, maupun kritis) dengan kepentingan (teknis, praktis, atau emansipatoris)". Meskipun demikian, tidak dapat diingkari bahwa secara praktis yang berlangsung justru sebaliknya, yaitu bisa jadi pengetahuan merupakan produk dari kepentingan.

---

* Draf dari tulisan ini pernah dipresentasikan dalam diskusi berkala FORUM INDONESIA MUDA (FIM) dengan mengambil topik "Pluralisme yang Berbingkai SARA" yang diselenggarakan oleh Harian Pagi *Kompas*, LP3ES dan Yayasan Wakaf Paramadina, di Jakarta 24 Pebruari 1997. Untuk keperluan publikasi, tulisan ini telah mengalami elaborasi secukupnya.

** Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Pengetahuan yang dimaksud dalam permasalahan ini dapat meliputi sebuah konsep, kesadaran umum maupun wacana publik. Ketiga hal ini secara fenomenologis merupakan konstruksi sosial dari masyarakat tertentu.[1] Persoalan yang paling mendasar dalam sebuah sistem sosial adalah kepentingan pihak mana atau kepentingan siapa yang paling dominan dalam penciptaan wacana publik tersebut. Kepentingan negara atau masyarakat? Gramsci (1971) menyebutkan bahwa institusi negara memiliki berbagai instrumen pemaksa — seperti birokrasi, administrasi dan militer — sehingga memiliki kapabilitas dalam melakukan dominasi politik. Akibat konkret yang timbul dari dominasi politik negara adalah tercipta hegemoni kesadaran individu setiap warga masyarakat. Maka wacana yang dimunculkan oleh negara dapat diterima dengan mudah oleh warga. Marcuse (1964) menyebutnya fenomena seperti ini sebagai "desublimasi represif". Orang merasa puas dengan wacana yang dimunculkan oleh negara meskipun wacana tersebut secara intelektual dan kultural bersifat menindas masyarakat. Dalam debat postmodernisme (Lash, 1990) ditegaskan bahwa gejala seperti itu merupakan produk dari keberadaan rezim pemaknaan (*regime of significance*) yang cenderung melakukan dominasi dan hegemoni makna atas berbagai peristiwa, pengetahuan, kesadaran dan wacana. Rezim itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan formal sebagai representasi dari penguasa negara. Oleh karena itu, dengan meminjam istilah Heryanto (1997), negara seyogyanya juga tidak dapat luput dari bidikan sebagai "tersangka" dalam proses penguasaan makna tersebut.

Demikian juga dengan kesadaran, pengetahuan dan wacana publik tentang pengertian SARA, yang juga tidak luput dari konstruksi politis negara. SARA merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Dalam konsep SARA tertuang pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antar golongan (Taufik Abdullah, 1997). Seperti halnya dengan rentetan kerusuhan yang timbul akhir-akhir ini, yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum seperti toko-toko milik Cina, rumah-rumah ibadat, sarana transportasi, keberingasan dalam kampanye politik'97, dll., selalu difahami oleh *the power holders* dalam konteks SARA. Mereka cenderung tidak pernah bergeming dari perspektif yang diyakininya dalam memahami penyebab kerusuhan, kecuali SARA selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kausa prima dari gejolak sosial tersebut. Dampak sosiologis dari kondisi seperti ini, konstruksi sosial tentang makna SARA dalam masyarakat lebih didominasi oleh perspektif rezim. Karena SARA menurut negara merupakan sumber perpecahan sosial maka menjadi

---

1 Realitas sosial berupa pengetahuan yang bersifat keseharian, seperti konsep, kesadaran umum dan wacana publik, menurut Berger dan Luckman merupakan hasil dari konstruksi sosial. Realitas itu dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa tetapi penuh dengan berbagai kepentingan politik. Lihat: Peter Berger dan Thomas Luckmman, *The Social Construction of Reality*, London: Penguin Books, 1984, hal. 31-62.

suatu pengetahuan atau realitas yang ditabukan. SARA oleh mereka selalu dilihat sebagai sebuah potensi konflik daripada energi politis yang dapat mewujudkan demokrasi dan kemajemukan sosial.

Ironisnya, sistem nilai yang kita yakini sebagai ideologi resmi negara mengakui adanya pluralitas SARA. Bahkan pluralitas itu dianggap sebagai pendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang majemuk di bawah slogan "Bhineka Tunggal Ika". Terjadilah diskrepansi antara sistem nilai atau ideologi (dunia kesadaran) dengan praktek politik keseharian (dunia riil). Untuk itu dalam rangka mengatasi kesenjangan antara *what ought to be* dan *what is* maka diperlukan wacana alternatif dalam memahami realitas SARA. Oleh karena itu setiap upaya untuk penciptaan wacana publik dalam rangka mewujudkan kemajemukan masyarakat Indonesia secara substansial, adalah dengan cara menghindari berbagai bentuk dominasi dan hegemoni atas wacana tertentu. Beberapa pokok pembahasan ringkas akan dimunculkan dalam tulisan ini yang meliputi problema pemaknaan SARA di tanah air, realitas sosial dan historis SARA sebagai energi pemberdayaan masyarakat, dan menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pemaknaan SARA versi Negara

Beberapa saat yang lalu telah terjadi serentetan amuk massa yang dilakukan oleh warga masyarakat di berbagai belahan bumi nusantara.[2] Contohnya, selama tahun 1995, misalnya, telah terjadi kerusuhan yang melibatkan amuk massa seperti perusakan yang dilakukan oleh petani di Jenggawah, perusakan Pengadilan Negeri di Kediri, perusakan toserba oleh umat Islam di Purwakarta dan Pekalongan, pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok anak muda umat Katholik terhadap seseorang yang dianggap melecehkan agama di Nusa Tenggara. Pada tahun 1996, rentetan amuk massa belum juga mereda, seperti amukan massa pecinta pemusik rock Iwan Fals di Bandung, perusakan beberapa gereja di Surabaya oleh orang-orang Islam, tragedi berdarah 27 Juli'97 yang berakibat hancurnya PDI, perusakan gedung Serbaguna di Jati Bening, perusakan rumah ibadat Kristiani oleh umat Islam di Situbondo, perusakan kantor polisi dan fasilitas umum oleh umat Islam di Tasikmalaya, kerusuhan antar etnis Dayak versus Madura di Sanggau Ledo dan Pontianak. Sedang pada tahun 1997 tercatat beberapa kerusuhan merambat ke kota-kota kecil, di antaranya di Rengasdengklok terjadi keberingasan massa akibat sentimen agama dan etnis, di Temanggung terjadi perkelahian antara Banser NU melawan PP dan AMPI, di Banjarnegara terjadi perkelahian antara serombongan pemuda bersepeda motor dengan sopir kendaraan umum, dll.

2 Kronologi peristiwa amuk massa yang disajikan secara sistematis dapat dilacak pada majalah *Forum Keadilan*, edisi No. 23 Tahun V, 23 Februari 1997.

Kampanye politik yang berlangsung dalam rangka "pesta demokrasi" untuk menyambut Pemilu'97 juga tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan dan keberingasan massa yang diwarnai oleh sentimen SARA. Sebagai contoh, di Yogyakarta telah terjadi berbagai tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh massa peserta kampanye Golkar terhadap kantor DPC PPP, penyerbuan terhadap kampus UII, penyerbuan terhadap masjid di kampus IAIN, dll.[3] Akibat peristiwa-peristiwa itu, berbagai pihak telah melakukan analisisnya lewat media massa, yaitu mulai dari agen resmi pemerintah melalui corong para pejabat dan birokratnya, para pengamat sosial-politik, aktivis-aktivis kemasyarakat, hingga para budayawan. Mereka bermaksud mencari akar-akar penyebab kerusuhan dan keberingasan sosial yang terjadi secara beruntun. Salah satu sinyalemen umum yang dilakukan oleh para pejabat resmi, yang mewakili suara negara, adalah cenderung menjadikan SARA sebagai faktor tersangka utama dalam menyebabkan terjadinya kerusuhan massal. Secara sadar atau tidak, para pejabat cenderung memahami bahwa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan merupakan potensi konflik yang setiap saat dapat meledak dengan *trigger* yang bermacam-macam. Misalnya, pemicu kerusuhan di Tasikmalaya adalah masalah Agama. Kausa prima dari kerusuhan yang mengakibatkan pembantaian massal di Sanggau Ledo adalah masalah Suku, yaitu perkelahian massal antara suku Madura (transmigran) versus Dayak (penduduk lokal). Sedang perkelahian di kota Temanggung, yaitu NU, PP, AMPI dan peristiwa kerusuhan dalam kampanye politik di Yogyakarta berakar pada persoalan antar Golongan.

Secara klise pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh para aparatur negara pada umumnya menegaskan bahwa ada pihak ketiga yang berupaya menunggangi dan sengaja memancing munculnya kekeruhan sosial, tanpa pernah ada hasil yang tuntas dan konkret, siapakah sebenarnya pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga itu cenderung dijadikan kambing hitam dan sekaligus mendapat "label" bahwa mereka adalah komunis yang menyusup dengan menjadikan agama sebagai kuda tunggangan dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu, orang-orang atau kelompok-kelompok yang melakukan kerusuhan sosial di mana-mana pada dasarnya tidak memahami arti P4, atau mereka adalah orang-orang yang anti ideologi negara sehingga semua itu mengganggu stabilitas nasional, dan masih segudang bentuk nama lain. Terapi yang diajukan oleh para pemegang kekuasaan adalah dengan cara memantapkan Pancasila sebagai ideologi resmi negara lewat penyuluhan, himbauan, penataran dll. dan sekaligus meningkatkan stabilitas politik dan terkesan tanpa harus mencari akar permasalahan itu. Akibatnya, solusi dari kerusuhan sosial tersebut bukannya diteliti dan didiskusikan secara tuntas tetapi ditenggelamkan dalam wacana stabilitas politik. Maka muncullah isu kebijakan perlunya keberadaan Pos Komando Kewaspadaan Nasional (PKKN) dalam rangka meningkatkan stabilitas politik.

---

3 Informasi tentang peristiwa tawur massal, pengrusakan, dan penyerbuan terhadap fasilitas publik dapat dilacak di harian pagi *Bernas* edisi-edisi bulan Mei 1997.

Sementara itu para pengamat sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan mencoba mencari penjelas kerusuhan sosial dari perspektif yang berbeda dengan cara memberikan wacana alternatif. Pada umumnya mereka sepakat bahwa rentetan kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Nusantara merupakan akibat dari kesenjangan ekonomi, iklim politik yang kurang demokratis, lembaga peradilan yang kurang mampu mewujudkan keadilan, dan komunikasi politik yang mengalami penyumbatan. Situasi sosial yang cenderung "monolitik" telah menciptakan berbagai bentuk ketimpangan sosial seperti konglomerasi, kolusi, korupsi, oknum disekitar *inner circle* kekuasaan yang berusaha mencari rente, bisnis keluarga pejabat yang mendasarkan pada fasilitas negara dan nepotisme, dll. Rasa keadilan masyarakat menjadi tersayat-sayat oleh realitas seperti itu sehingga jalan keluar yang muncul adalah kekerasan dengan eskalasi yang berarti. Kondisi politik seperti ini telah mengakibatkan munculah fenomena marginalisasi yang dialami oleh sekelompok atau lapisan sosial di mana-mana. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akses dalam menyuarakan aspirasinya, baik dalam pengertian ekonomi, sosial dan politik. Contoh marginalisasi ini nampak jelas pada kasus pemberontakan petani di Jenggawah, perilaku beringas etnis Dayak di Sanggau Ledo, frustrasi pedagang tradisional di Tasikmalaya, amuk pedagang kaki lima di Tanah Abang, kebrutalan orang asli Irian di sekitar proyek Freeport, dll.

Solusi yang ditawarkan oleh para pengamat sosial tersebut adalah berupaya mendeskripsikan akar-akar persoalan amuk massa secara mendasar, memahami dengan kepentingan emansipatoris, dan mencari jalan keluar secara praktis lewat kelenturan politik yang mengarah pada demokratisasi. Pendekatan seperti ini tidak salah, bahkan pada jenjang tertentu memiliki relevansinya, karena memang berbagai informasi sosial-ekonomi menunjukan bahwa kita mengalami tingkat kesenjangan antar daerah dan kelompok yang cukup signifikan untuk munculnya fenomena disintegrasi sosial. Bahkan pendekatan seperti ini banyak mendapat dukungan dari para ilmuwan sosial yang kurang puas terhadap pendekatan modernisme. Namun kalau diamati secara seksama, ada satu wacana yang tidak muncul, atau memang sengaja tidak dimunculkan karena kepentingan politis, dalam upaya mencari penjelas kerusuhan sosial, yaitu wacana sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann, 1984) tentang konstruksi sosial SARA yang dilakukan oleh negara. Tulisan ini tidak bermaksud menyudutkan negara sebagai dalang kerusuhan sosial yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi berupaya membuka mata bahwa pihak manapun seperti lapisan miskin, kaya, kaum intelektual, dan aparatus negara memiliki probabilistik yang sama sebagai penyebab kerusuhan sosial, baik langsung maupun tidak langsung, secara instrumental maupun ideologis.

Ada kesan umum yang difahami melalui jalan fikiran orang-orang awam bahwa SARA merupakan sebuah potensi yang dapat menciptakan berbagai konflik sosial. Bahkan negara selalu mengkonstruksikan bahwa SARA merupakan unsur yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa sehingga harus selalu diwaspadai. Kemajemukan

masyarakat Indonesia yang terdiri dari unsur-unsur yang ada di dalam pengertian SARA dianggap sebagai sesuatu yang *given* dan tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. Perbedaan di antara elemen-elemen SARA merupakan takdir sebuah bangsa dan membicarakan perbedaan tersebut sama artinya menciptakan perpecahan itu sendiri karena "seolah-olah" telah ingkar dari takdir. Misalnya, diskusi tentang ketimpangan etnis cenderung ditabukan karena akan menciptakan perpecahan yang berbau SARA. Hingga saat ini tidak pernah ada diskusi apalagi jawaban tuntas, mengapa orang-orang dayak "menjadi" lebih marginal dari etnis Jawa, mengapa kaum pendatang Cina, Bugis dan Padang di Timor Timur mendominasi perdagangan, mengapa minoritas Cina di tanah air menjadi mayoritas penguasa ekonomi, dll. Apalagi mendiskusikan tentang "kebenaran" agama, hal itu sangat ditabukan karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Harus diakui bahwa setiap agama memang mengabarkan dan memiliki kebenaran sendiri-sendiri, tetapi yang harus disadari adalah manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran tersebut. Sehingga solusi yang bijaksana adalah perlunya mendiskusikan kebenaran lintas agama menjadi sesuatu yang mutlak dan perlu. Ironisnya maksud baik tersebut cenderung dihindari dalam rangka menghindari perpecahan yang berbau SARA, dan hal ini telah menjadi semacam "kesadaran umum".

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pada satu sisi wacana tentang SARA yang muncul dalam masyarakat cenderung ditabukan, namun ironisnya pada sisi lain kebijakan publik secara nyata maupun terselubung menciptakan problema SARA itu sendiri. Contoh konkret adalah terjadinya pembangunan wilayah yang timpang antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, diskriminasi di sektor ekonomi terhadap pribumi dan pengusaha kecil, dll. Hal itu semua bila dikaji secara mendalam justru berpeluang menciptakan potensi konflik yang berbau SARA. Oleh karenanya, pemaknaan sepihak atas pengertian dan wacana SARA yang dilakukan oleh *the power holders* cenderung menciptakan "api dalam sekam" yang sewaktu-waktu dapat meledak. Ada sebuah hipotesis yang perlu dibuktikan dan sekaligus diuji kebenarannya bahwa "menenggelamkan wacana SARA dapat dipandang sebagai sebuah pengalihan isu politik mendasar, yaitu problema demokrasi dan keadilan". Maka dalam rangka menghindarkan keresahan sosial, gejolak masyarakat, amuk massa yang semuanya mengarah pada disintegrasi sosial berkepanjangan diperlukan wacana alternatif tentang SARA. Wacana tersebut seyogyanya memunculkan isu SARA dalam dimensi yang tidak *one sided* tetapi secara seimbang, dalam pengertian memahami wacana SARA baik dari sisi negatif dan juga sebanding dengan sisi positifnya.

SARA Sebagai Energi Kemajemukan dan Demokrasi

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan atau menjadi sebuah akronim yang disebut SARA adalah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyara

kat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi, tetapi pada sudut lain (berdasarkan temuan-temuan historis) SARA justru dijadikan arena pemberdayaan dan demokrasi. Indonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta orang dan terdiri dari multi etnis (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian) di mana masing-masing masih dibagi lagi ke dalam sub-sub etnis seperti Sunda, Padang, Amungme, dll. Di tanah air agama juga terdiri dari bermacam-macam mulai dari Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, agama lokal, dan aliran-aliran kepercayaan. Elemen-elemen dalam SARA tidak selalu terpisah secara kaku tetapi ada kemungkinan terjadi apa yang oleh seorang sosiolog yang bernama Peter Blau (1964) dinamakan *cross cutting affiliation*. Misalnya, ada orang-orang yang berbeda ditinjau dari etnis tetapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan yang sama. Dari sisi etnis Batak dan Cina berbeda tetapi kadang disatukan karena mereka pemeluk agama Protestan dan sama-sama berdagang. Selain itu masih banyak lagi kelompok-kelompok kepentingan yang berkembang dalam masyarakat dari sekedar untuk reuni dan kangen-kangenan hingga kelompok strategis yang memiliki interest mempertahankan *status quo*. Semua elemen itu dapat berpeluang sebagai konflik sekaligus kekuatan integratif.

Karena SARA merupakan kenyataan sosial maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi melalui "monolitikisasi" masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan disintegrasi sosial. Kemajemukan masyarakat (*plures*) tidak dapat dilenyapkan demi yargon persatuan (*unum*), sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas (Berger dan Neuhauss, 1977). Contoh paling konkrit adalah politik apartheid yang dilakukan oleh rezim kulit putih di Afrika Selatan telah menghasilkan pergolakan sosial yang berkepanjangan dan pertumpahan darah yang memakan banyak korban jiwa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pergolakan sosial yang diakibatkan oleh keingkaran rezim politik terhadap realitas SARA.

Dengan memahami realitas historis seperti diungkapkan di atas maka ideologi dan perspektif dalam memahami SARA harus dijungkir balikan, yaitu dari ideologi SARA sebagai sumber pemicu perpecahan menjadi SARA sebagai kekuatan untuk pemberdayaan dan demokrasi masyarakat. Namun langkah pembalikan perspektif saja tidak cukup sebab dibutuhkan supra dan infra-struktur politik yang memadai dan mendukung proses itu. Salah satu caranya adalah dengan meletakan peran negara sebagai fasilitator, dinamisator dan stabilisator kekuatan-kekuatan yang ada dalam komponen-komponen SARA. Jelas, di dalam setiap elemen SARA masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan secara diametral dapat bertabrakan. Pada titik inilah negara berupaya menjembatani atau mengakomodasi setiap tabrakan kepentingan tersebut. Tetapi tuntutan peran negara

seperti itu hanya bisa direalisasi kalau negara betul-betul *embedded* dalam masyarakatnya sehingga setiap kebijakan yang ditelurkan selalu mewakili masyarakatnya. Dengan kata lain peran tersebut hanya bisa terjadi dalam negara yang sistem politiknya demokratis. Dalam sebuah negara yang monolitik maka realitas SARA cenderung dilenyapkan, tentu saja demi keutuhan sebuah rezim, lewat kekuatan dominan atau bahkan salah satu elemennya — misalnya agama — dikooptasi dan didepolitisasi. Contohnya, agama tidak boleh digunakan untuk sarana berpolitik, tetapi kenyataannya, oleh penguasa agama tidak jarang digunakan sebagai alat memobolisasi rakyat demi kepentingan rezim.

Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat memiliki hulu teori pada pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhauss (1977) tentang "*mediating structures*" atau peran institusi-institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakat bahwa institusi-institusi mediasi yang secara konkret dapat meliputi kelompok ketetanggaan, agama, etnis, keluarga atau trah, dan kelompok keswadayaan (termasuk kelompok kepentingan) dapat dimanfaatkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu-individu akan merasa tidak berdaya dalam menyalurkan aspirasinya bila berdiri sebagai person dalam menghadapi negara dan kebijakan-kebijakannya yang impersonal. Mereka akan merasa lebih berdaya kalau menyalurkan kepentingannya lewat institusi-institusi mediasi karena dalam institusi itu sifat personal masih diakui, atau masih ada pengakuan terhadap identitas person, sedang realitas publik sangat impersonal. Berdasarkan kerangka berfikir seperti itu maka elemen-elemen yang ada dalam SARA juga merupakan institusi-insitusi mediasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembèrdayaan dalam rangka demokratisasi politik.

Temuan-temuan sejarah dan hasil-hasil deskripsi para ahli sosiologi-antropologi telah membuktikan bahwa institusi-institusi mediasi bermanfaat untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju kemajemukan dan demokrasi. Pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda banyak orang-orang pribumi yang menggunakan institusi mediasi dalam bentuk SARA, misal etnis, sebagai sarana perjuangan penyaluran aspirasi politik. Secara individual mereka tidak berdaya dalam menghadapi kebijakan pemerintah kolonial maka digunakanlah etnis sebagai alat perjuangan. Sebagai contoh pada masa kolonial pemuda-pemuda Nusantara berjuang lewat media etnis dengan membentuk Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, dll. Mediasi agama juga digunakan oleh pedagang-pedagang Islam yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah kolonial dengan memberi konsesi pada pedagang Cina maka mereka mendirikan Serikat dagang Islam. Contoh kontemporernya adalah peran institusi gereja Katholik di Timor Timur dalam proses integrasi. Banyak pemuda-pemuda yang terluka akibat bentrokan dengan aparat tidak dilarikan oleh masyarakat ke RSU tetapi ke gereja, sebab bagi masyarakat Timor Timur gereja dirasa memberikan perlindungan spiritual dan politik terhadap individu dan sekaligus dijadikan sebagai alat perjuangan politik.

Masih banyak contoh di belahan dunia lain, seperti gerakan Black Moslem di Amerika Serikat, peran gereja Katholik dalam terwujudnya gerakan *people power* di Filipina yang menumbangkan penguasa otoriter Marcos, Ordo Fransiska yang melawan kekuasaan kejam di Amerika Latin, gerakan Islam di kepulauan Moro, dll. Pendek kalimat, banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa elemen-elemen yang ada di dalam SARA merupakan institusi mediasi yang bermanfaat untuk menyuarakan dan aktualisasi politik. Dari contoh yang sifatnya internasional hinggal lokal seperti munculnya asosiasi pedagang kecil yang bernaung di bawah kelompok pengajian dalam rangka menghadapi rentenir (Nugroho, 1997), dll. Meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa institusi SARA ini dapat secara penuh digunakan sebagai sarana pemberdayaan karena semuanya berpulang kepada bagaimana peran negara. Apakah ia berperan sebagai fasilitator, dinamisator atau kooptator? Apakah dia memiliki ciri yang demokratis atau monolitik? Maka hipotesis sementara yang dapat diturunkan dari wacana ini adalah bahwa "sebuah negara yang memiliki ciri-ciri demokratis cenderung akan berperan sebagai fasilitator dan memanfaatkan institusi SARA sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui pluralisme," sementara itu "sebuah negara yang memiliki ciri-ciri monolitik cenderung akan mengeksploitasi institusi SARA sebagai sarana kooptasi dan mobilisasi massa demi kepentingan rezim penguasa".

Mewujudkan Kemajemukan Indonesia

Mewujudkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang tidak hanya dalam cita-cita tetapi juga terwujud menjadi kenyataan sosial-politik sehar-hari yang didambakan oleh setiap warga memerlukan berbagai bentuk persyaratan. Persyaratan itu berupa adanya pengakuan secara formal dan substansial -baik dari pemegang kekuasaan, masyarakat umum, maupun kelompok sosial, politik dan kebudayaan- bahwa konsep dan realitas SARA merupakan energi politik dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi kalau pluralisme hendak direalisasikan. Pertama, diperlukan *political will* dari pemegang kekuasaan yang sungguh-sungguh dan tulus dalam meletakan supra dan infra-struktur politik yang mengakui adanya pluralisme. Kedua, masyarakat dari golongan dan lapisan manapun diberi hak untuk ikut terlibat dalam perdebatan atau diskusi publik tentang SARA, tanpa harus ada pemaksaan makna dari negara terhadap masyarakat sipil. Ketiga, semua pihak seyogyanya memahami bahwa SARA selain berpeluang menciptakan konflik (hal ini cenderung terjadi dalam iklim politis yang monolitik) tetapi juga dapat menjadi energi dalam mewujudkan proses pemberdayaan atau demokrasi (hal ini cenderung terjadi dalam iklim politik yang liberal).

Tanpa persyaratan tersebut pluralisme masyarakat Indonesia yang tertuang dalam cita-cita "Bhineka Tunggal Ika" hanya akan tinggal dalam utopia, sebab yang akan hadir dalam pentas politik sehari-hari secara riil adalah kenyataan "kemajemukan masyarakat yang

sebatas yargon yang dimunculkan oleh negara, tetapi kenyataannya justru ingkar dari jargon tersebut". Artinya, SARA yang difahami sebagai energi yang mengandung kekuatan konflik tanpa memperhitungkan SARA sebagai potensi demokrasi. Pandangan pluralisme dalam pengertian substansial ada dalam ungkapan latin, yaitu "*E Pluribus Unum*". Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa pengakuan terhadap kemajemukan SARA atau masyarakat cenderung akan mencegah tindakan politik yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebuah kelompok -bisa berupa rezim politik, kelompok kepentingan, suku, agama dll. Pandangan seperti ini bila diamalkan dalam kehidupan politik yang konkret akan menghindarkan masyarakat dari sebuah mekanisme *zero-sume game*, karena kemenangan tidak hanya dinikmati oleh salah satu kelompok saja tetapi oleh semua pihak yang terlibat proses negosiasi politik.

Argumen di atas lebih didasarkan pada realitas empiris bahwa kesatuan (*unum*) mustahil dicapai melalui pengorbanan atas kemajemukan (*plures*), dari pada yargon yang selama ini sering didengung-dengungkan. Harus diakui bahwa dalam sebuah masyarakat yang sepakat menganut faham politik plurali cenderung akan terjadi ketegangan yang bersifat permanen dari berbagai kekuatan dialektik yang ada di dalam komponen-komponen SARA. Namun bila ketegangan itu dibingkai dalam sebuah sistem politik yang demokratis maka yang akan terjadi transfer energi konflik ke dalam fenomena diskusi publik, "perselisihan" antar keyakinan ideologi atau paradigma, dan debat dalam parlemen yang hangat. Semua perselisihan cenderung akan menghasilkan kesepakatan. Namun perlu diakui bahwa kesepakatan hanya merupakan satu fase dari dialektika dalam masyarakat demokratis. Oleh karenanya, liberalisasi, demokrasi dan pluralitas politik adalah merupakan sebuah proses sosial yang tidak melarikan diri dari partikularitas. Sebab merupakan sebuah upaya dalam menyingkap partikularitas secara sehat dan wajar sehingga mendatangkan pendewasaan politik di tanah air. Jadi analisis ini menawarkan sebuah upaya pembalikan wacana dari "wacana pluralisme sebagai energi destruksi sosial" menjadi "wacana SARA sebagai kekuatan untuk mempromosikan pemberdayaan dan demokrasi masyarakat".***

Daftar Pustaka

Berger, Peter L. & Richard J. Neuhauss. *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*, Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977.

Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin, 1984.

Blau, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley, 1964.

Derrida, J. *Writting and Difference*, Chicago: University of Chicago Press, 1978.

Gramsci, Antonio. *Selection from Prison Notebooks*, New left Books, 1971.

Habermas, Juergen. *Knowledge and Human Interest*, London: Heinemann, 1972.

Heryanto, Ariel. "Kekerasan Politik" dalam *Forum Keadilan* edisi No. 23 Tahun V. 24 Februari 1997.

Lash, Scott. *Sociology of Postmodernism*. London: Routledge, 1990.

Marcuse, Herbert. *One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston: Beacon Press, 1964.

Nugroho, Heru. "Institusi-institusi Mediasi sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah: Studi Kasus Arisan di Bantul dan *Credit Union* di Timor Timur" dalam *Analisis* edisi Tahun XXVI, No. 1, Januari-Februari 1997.